



**BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DESA KEBADONGAN  
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN  
PADA PILKADA LANGSUNG TAHUN 2015**

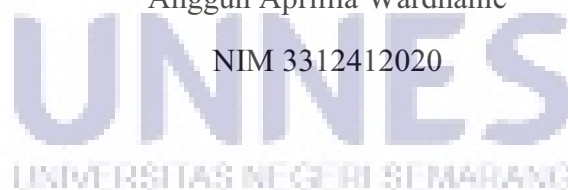
**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Universitas Negeri Semarang

Oleh:

Anggun Aprillia Wardhanie

NIM 3312412020



**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada.

Hari : SENIN,

Tanggal : 13 NOVEMBER 2017

Menyetujui

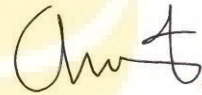
Dosen Pembimbing I



Puji Lestari S.Pd., M.Si.

NIP. 197707152001122008

Dosen Pembimbing II



Moh. Aris Munandar S.Sos., MM

NIP. 195610101985031003

Mengesahkan,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Drs. Tijan, M.Si

NIP. 196211201987021001

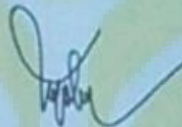
## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada.

Hari : SENIN,

Tanggal : 20 NOVEMBER 2017

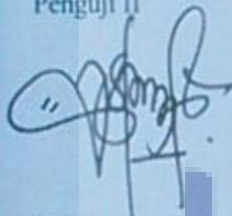
Penguji I



Drs. Ngabiyanto, M.Si

NIP. 196501031990021001

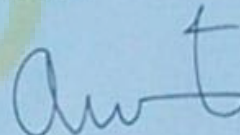
Penguji II



Puji Lestari S.Pd., M.Si.

NIP. 196306121986011002

Penguji III



Moh. Aris Munandar S.Sos., MM.

NIP. 195610101985031003

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang



Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A

NIP. 196308021988031001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dari jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 7 Juli 2017



Anggun Aprillia Wardhanie  
NIM 3312412020



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. Aku suka melihat diriku sebagai pembangun jembatan, dimana aku membangun jembatan diantara orang-orang, diantara ras-ras, diantara budaya-budaya, diantara politik-politik, mencoba untuk mencari alasan yang lazim (T. D. Jakes).
2. Hanya karena kamu tidak memiliki ketertarikan terhadap politik, bukan berarti politik tidak akan tertarik padamu (Pericles).
3. Pada politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika hal tersebut terjadi, kamu bisa bertaruh ini sudah direncanakan sedemikian rupa (Franklin D. Roosevelt).

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk.

1. Mama dan Bapakku tercinta.
2. Keluarga besarku.
3. *Partner* terbaikku Nuzul Qurrota Sukma.
4. Sahabatku Wening Tri Mawanti dan Adi Nugroho.
5. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Unnes 2012, Bidik Misi, DPM FIS 2013, Paduan Suara FIS 2013, dan Hima PKn 2014.
6. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

## PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Budaya Politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015”**. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

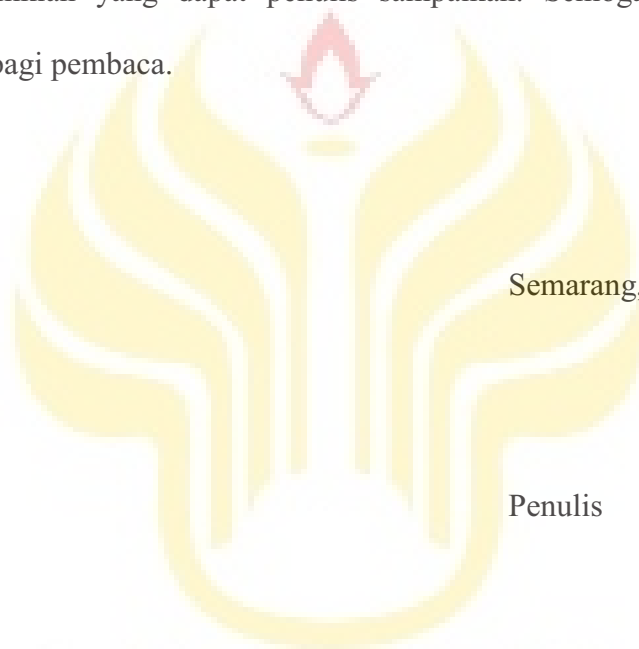
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kelancaran dalam perizinan penelitian.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
4. Ibu Puji Lestari, S.Pd., M.Si., Dosen Pembimbing I yang dengan tulus dan sabar memberikan bimbingan dan memberi petunjuk, serta saran hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Moh. Aris Munandar S.Sos., MM., Dosen Pembimbing II yang dengan tulus dan sabar memberikan bimbingan dan memberi petunjuk, serta saran hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Politik dan Kewarganegaraan dan seluruh Staf dan Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
7. Bapak Marjuni selaku Kepala Desa Kedadongan, seluruh Perangkat Desa Kedadongan dan Masyarakat Desa Kedadongan yang telah membantu memberikan data dan informasi untuk peneliti.
8. Mama Puji Astuti dan Bapak Amin Mujiono yang selalu memberikan doa, motivasi, inspirasi, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Keluarga besarku yang telah banyak memberikan bantuan, doa, dukungan, dan inspirasi.
10. *Partner* terbaikku dalam segala hal Nuzul Qurrota Sukma, terima kasih untuk selalu ada dalam keadaan apapun, memberikan doa, motivasi, dukungan, dan semangat.
11. Sahabatku Wening Tri Mawanti dan Adi Nugroho, serta teman-teman terbaik dari Ilmu Politik 2012 yang memberikan andil besar dalam proses skripsi penulis, yaitu Luwes Tri Utami, Hesti Nurmaulita, Siti Muslikhatul Ummah, Arima Ratih Tunjungsari, Rizqi Aziza Sari, dan Firna Larasanti.
12. Teman-teman seperjuangan prodi Ilmu Politik Angkatan 2012, terima kasih atas doa dan dukungannya.

13. Bidik Misi, rekan DPM FIS 2013, Paduan Suara FIS tahun 2013, Hima PKn tahun 2014, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini berjalan hingga akhirnya dapat terselesaikan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.



Semarang, 7 Juli 2017

Penulis

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## SARI

Wardhanie, Anggun Aprillia. 2017. *Budaya Politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Puji Lestari S.Pd., M.Si. Moh. Aris Munandar S.Sos., MM., 143 halaman.

### **Kata Kunci: Politik, Budaya Politik, Partisipasi Politik, Masyarakat, Pilkada**

Masyarakat Desa Kedadongan merupakan masyarakat desa yang cukup terbuka terhadap hal-hal baru, tetapi taraf hidup mereka yang merupakan ekonomi menengah kebawah tampaknya sulit untuk menjadikan mereka aktif dalam hal politik. Namun, bagaimanakah ketika diadakan Pilkada Langsung Tahun 2015, apakah mereka akan cenderung pasif ataukah aktif. Hal ini kemudian menarik untuk ditelaah mengenai budaya politik masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015; 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitiannya yaitu 1) pemahaman dan peran Masyarakat Desa Kedadongan terhadap sistem politik; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan pada Pilkada Langsung Tahun 2015. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data, dan 4) kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Kedadongan secara umum termasuk ke dalam tipe budaya politik subjek-partisipan sesuai dengan teori Gabriel Almond dan Sidney Verba. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pendidikan, media massa, dan imbalan.

Saran penulis 1) masyarakat diharapkan mampu menyaring informasi-informasi politik secara bijak; 2) masyarakat diharapkan bisa lebih aktif dalam berbagai kegiatan politik di wilayah yang lebih luas.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>SARI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Batasan Istilah .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
A. Budaya Politik .....	8
1. Sejarah dan Pengertian Budaya Politik .....	8
2. Orientasi Kognitif, Afektif, dan Evaluatif .....	14
3. Tipe-tipe Budaya Politik .....	16
B. Partisipasi Politik .....	22
1. Pengertian Partisipasi Politik .....	23
2. Bentuk Partisipasi Politik .....	24
3. Fungsi Partisipasi Politik .....	28
C. Masyarakat .....	28
1. Pengertian Masyarakat .....	28
2. Macam-macam Masyarakat .....	29
D. Pemilihan Umum .....	33
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	33
2. Pilkada .....	34
E. Kerangka Berpikir .....	37
F. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Latar Penelitian .....	41
B. Fokus Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	42
1. Data Primer .....	42
2. Data Sekunder .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
1. Wawancara .....	43
2. Observasi .....	43
3. Dokumentasi .....	44

E. Uji Validitas Data .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
1. Lokasi Penelitian.....	47
2. Kondisi Demografi.....	47
3. Perekonomian Desa .....	49
4. Pendidikan.....	49
5. Agama .....	50
B. Hasil Penelitian	
1. Budaya Politik Masyarakat Desa Keadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015 .....	51
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budaya Politik Masyarakat Desa Keadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015.....	65
C. Pembahasan	
1. Budaya Politik Masyarakat Desa Keadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015 .....	68
2. Pendidikan, Media Massa, dan Imbalan sebagai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budaya Politik Masyarakat Desa Keadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015 .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
<b>LAMPIRAN</b> .....	93

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur .....	48
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir.....	37
Gambar 2 Wawancara dengan Marjuni selaku kepala desa.....	142
Gambar 3 Wawancara dengan Wahyu selaku ketua RW.....	142
Gambar 4 Wawancara dengan Umi selaku masyarakat.....	142
Gambar 5 Wawancara dengan Budiyanto selaku masyarakat .....	143



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.....	93
Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian .....	94
Lampiran 3 Profil Desa Kedadongan .....	95
Lampiran 4 Instrumen Penelitian .....	111
Lampiran 5 Pedoman Wawancara .....	120
Lampiran 6 Transkrip Wawancara .....	124
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	142



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan beragam kebudayaan. Masyarakatnya juga majemuk yang berasal dari berbagai suku. Hal tersebut menyebabkan demokrasi di Indonesia sangat sulit jika dilaksanakan secara langsung. Demokrasi diselenggarakan melalui prinsip perwakilan sehingga pemerintahan yang terbentuk disebut juga dengan pemerintahan perwakilan atau pemerintahan *representatif*. Semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi pada pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2010: 461).

Masyarakat tidak dapat terlepas dari politik, hal tersebut sudah menyatu dengan kehidupan mereka. Kehidupan politik merupakan bagian dari interaksi hidup mereka, baik dengan sesama masyarakat maupun dengan pemerintah atau lembaga-lembaga di luar pemerintah (lembaga non-formal). Interaksi tersebut mengalami internalisasi ke dalam masyarakat yang selanjutnya membentuk beragam pandangan, sikap, dan pengetahuan tentang praktik-praktik politik dalam sistem politik yang akan menentukan bagaimana perilaku masyarakat tersebut. Sesuai dengan teori Gabriel Almond dan

Sidney Verba, kita dapat mengetahui budaya politik masyarakat ketika telah memahami mengenai sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku mereka terhadap politik.

Budaya politik bagi pandangan Gabriel Almond dan Sidney Verba adalah merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Sistem politik mengalami internalisasi ke dalam beberapa bentuk orientasi diantaranya 1) orientasi kognitif berisikan pengetahuan dan kesadaran terhadap politik dan kepercayaan pada objek-objek politik; 2) orientasi afektif berisikan perasaan-perasaan dan emosi-emosi terhadap objek-objek politik atau sistem politik; dan 3) orientasi evaluatif berisikan keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Dengan orientasi politik yang semacam itu, maka selanjutnya akan terbentuklah budaya politik yang berbeda-beda pula (Sitepu, 2012: 164).

Masyarakat saat ini disuguhkan dengan berbagai praktik politik yang terpapar di media massa, media cetak, maupun media sosial yang juga dialami oleh Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Hal ini pastinya juga mempengaruhi pilihan politik mereka. Oleh karena semua warga negara berhak memberikan suaranya pada pemilihan umum, Masyarakat Desa Kedadongan juga ikut andil dalam hal tersebut. Namun, apakah masyarakat desa dengan mata pencaharian dominan petani dan pendidikan masyarakatnya yang tergolong rendah mampu menghasilkan



budaya politik yang aktif pada politik. Beberapa hal yang belum terungkap adalah bagaimana orientasi politik Masyarakat Desa Kedadongan dan memunculkan budaya politik mereka yang termasuk ke dalam bentuk atau tipe yang seperti apa. Guna memfokuskan penelitian dan mendapat data yang akurat, penulis memilih meneliti budaya politik masyarakat pada Pilkada Langsung Tahun 2015. Kemudian, pada saat pemilihan umum juga sangat kentara bagaimana pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap politik.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan dengan skripsi yang berjudul “Budaya Politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015”. Demikian, semoga dapat memberikan kebermanfaatan bagi pembaca.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015?
2. Adakah faktor yang mempengaruhi budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui budaya politik masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, menambah pengalaman bagi peneliti, dan mampu memberikan gambaran budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015.

##### **b. Bagi Civitas Akademika**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu-ilmu sosial khususnya tentang budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015 dan

menambah koleksi buku-buku perpustakaan yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai studi ilmiah yang memberikan informasi bagi peneliti khususnya tentang budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015.

### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perangkat desa dan Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen mengenai budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada Pilkada Langsung Tahun 2015.

## **E. Batasan Istilah**

Batasan istilah dimaksudkan agar dapat terjadi kesamaan penafsiran dan kesatuan pandangan terhadap judul skripsi. Istilah yang digunakan adalah sebagai berikut.

### **1. Budaya Politik**

Budaya politik yang dimaksud ialah sikap Masyarakat Desa Kedadongan terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap Masyarakat Desa Kedadongan terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Komponen-komponen dalam sistem

politik yang dimaksud ialah kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan, dan kebijakan. Penelitian budaya politik di Desa Kedadongan dibatasi pada pemahaman dan peran masyarakat terhadap sistem politik khususnya pada saat Pilkada Langsung Tahun 2015. Oleh karena itu, budaya politik dalam penelitian ini ingin mengetahui pemahaman dan peran masyarakat secara umum pada suatu sistem politik, bagaimana sikap, peran, dan perilaku masyarakat terhadap politik, khususnya pada saat Pilkada Langsung Tahun 2015.

## **2. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik dalam penelitian ini dibatasi pada partisipasi politik Masyarakat Desa Kedadongan pada saat berlangsungnya Pilkada Langsung Tahun 2015. Peneliti melihat apakah masyarakat terlibat dalam proses Pilkada tersebut, kemudian apa alasan masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, dan bagaimana partisipasi ini kemudian memberikan andil terhadap budaya politik di Desa Kedadongan khususnya pada saat Pilkada Langsung Tahun 2015. Masyarakat Desa Kedadongan yang diteliti memiliki pengetahuan mengenai Pemilu tersebut, baik yang memberikan suara maupun yang tidak (golput).

## **3. Masyarakat Desa Kedadongan**

Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen ialah masyarakat yang tinggal, hidup, dan berinteraksi di desa tersebut. Pada penelitian ini Masyarakat Desa Kedadongan yang diteliti dibatasi pada masyarakat yang bertempat tinggal dan menetap di Desa Kedadongan dengan alamat yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) yaitu Desa Kedadongan. Kemudian, masyarakat pada penelitian juga harus mengetahui dan mengikuti Pilkada Langsung Tahun 2015 yaitu Pilbup 9 Desember 2015. Jadi, apabila ada

masyarakat yang tidak tinggal dan menetap di Desa Kedadongan atau tidak mengikuti Pilkada Langsung Tahun 2015, maka tidak dijadikan subjek penelitian. Masyarakat Desa Kedadongan yang diteliti termasuk ke dalam golongan umur yang diperbolehkan ikut serta pada pemilihan umum yaitu usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, individu lebih matang secara emosi dan dapat ikut serta dalam kegiatan politik, salah satunya yaitu pemilihan umum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. DESKRIPSI TEORETIS

##### 1. Budaya Politik

Budaya politik tidak terlepas dari kebudayaan dan politik karena hal ini merupakan perpaduan dari dua keilmuan tersebut. Kebudayaan memiliki asal mula, “Kebudayaan berasal dari terjemahan kata kultur yang dalam bahasa Latin yaitu *cultura* berarti memelihara, mengolah, dan mengerjakan .... Kebudayaan adalah sesuatu yang tidak terbatas pada hal-hal yang kasat mata tentang manusia, melainkan juga menyangkut hal-hal yang abstrak” (Endraswara, 2006: 4-5). Basrowi (2005: 75-88), menyatakan bahwa di dalam kebudayaan juga terdapat nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial.

Nilai-nilai sosial dipahami sebagai konsep yang beruang lingkup luas, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai apa yang paling berharga dalam hidup. Rangkaian konsep itu berkaitan dan merupakan sebuah sistem yang menjadi pedoman yang melekat secara emosional, sehingga menjadi pedoman juga sekaligus menjadi tujuan. Kemudian norma sosial dimaknai sebagai aturan yang mengandung sanksi yang relatif tegas terhadap pelanggarnya dan lebih banyak penekanannya sebagai peraturan-peraturan yang selalu disertai oleh sanksi-sanksi yang merupakan faktor pendorong bagi individu atau kelompok masyarakat untuk meraih ukuran-ukuran sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan.

Secara lebih luas, arti budaya merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat model pengetahuan yang secara selektif dapat

digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi serta untuk mendorong menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya. Budaya dapat dipandang sebagai semua cara hidup yang harus dipelajari, diharapkan, dan sama-sama diikuti serta dipedomani oleh warga masyarakat tertentu. Singkat kata, budaya merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa (Digdoyo, 2015: 52).

Kebudayaan Indonesia di masa lalu juga menarik untuk diketahui. Menurut Kuntowijoyo (2006: 31-36), kebudayaan Indonesia di masa lalu diwarnai oleh dualisme. Ungkapan “*desa mawa cara, negara mawa tata*” menunjukkan adanya dua subsistem dalam masyarakat tradisional. Kebudayaan kraton memancarkan sinarnya ke kebudayaan desa karena sarana produksi dikuasai pusat kerajaan, tapi tidak sebaliknya. Pembudayaan desa itu bertujuan menegaskan legitimasi penguasa untuk melestarikan tertib dan lapisan sosial. Pusat kekuasaan dan kebudayaan dominan pada kerajaan.

Sebagaimana kebudayaan *kejawan* terpecah ke dalam Surakarta dan Yogyakarta, demikian pula tumbuh pusat lainnya di daerah *mancanegara* dan *pesisir* dengan *patronage* para bupati di daerah-daerah. Perkembangan budaya tradisional hanya bersifat *sigtagmatis*, yaitu pluralisme budaya ditampakkan lebih dalam perbedaan variasi semata-mata dan tidak mengubah pola. Dengan meluasnya birokrasi kolonial, tumbuhlah satu golongan baru dalam masyarakat yang disebut golongan priyayi. Golongan ini terlepas dari ikatan kraton, subordinasi mereka tidak lagi kepada raja tetapi kepada pemerintah kolonial.

Kuntowijoyo juga menyatakan, terjadi pendekatan antara kebudayaan rakyat dengan kebudayaan kraton sesudah masa ini, karena dualisme tidak lagi diperlukan sebagai simbol kultural dari subordinasi

petani kepada kelas kerajaan, kraton para bangsawan, subordinasi kebudayaan rakyat kepada kebudayaan kraton. Perubahan sosial selanjutnya terjadi dengan munculnya kelas-kelas menengah di kota, terdiri dari golongan intelektual, pedagang, dan pengusaha. Awalnya golongan kelas menengah ini tidak memusatkan perhatian pada masalah kebudayaan, tetapi pada masalah-masalah politik dan ekonomis, hampir tidak mungkin menjadi patron dari suatu kebudayaan baru. Apalagi kelas menengah ini mempunyai tradisi santri yang kuat, dari alam budaya desa dan santri, tidak tertarik pada gerakan kebudayaan, dan sikap mereka yang puritan.

Namun, kelas menengah itu akhirnya menjadi pendukung kebudayaan baru. Kelas menengah pendukung budaya baru itu banyak berasal dari luar Jawa, sebab dualisme budaya di luar Jawa rupa-rupanya dijabatani oleh enkulturasi dari kebudayaan Islam. Demikianlah mereka menjadi patron bagi nilai-nilai budaya kesenian dan kesusasteraan baru. Pusat kreativitas berpindah dari desa ke kota, dari kraton ke gedung sandiwara, percetakan, dan toko-toko. Kebudayaan tradisional yang pusat-pusatnya terpukul oleh perubahan kekuasaan dan patronnya oleh perubahan sosial dan ekonomis akhirnya juga mengalami perubahan-perubahan paradigmatis.

Kemudian, politik juga termasuk ke dalam bagian budaya politik. Maran (2007: 13-18) menyebutkan bahwa “Negara tidak lepas dari hal-hal tentang kekuasaan, struktur pemerintahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, maka pasti terdapat politik di dalamnya. Ilmu politik sendiri memang menaruh perhatian pada kekuasaan, karakteristik-karakteristik dan kegiatan-kegiatan pemerintah, serta aktivitas-aktivitas politik dalam lingkungan masyarakat yang berbeda-beda .... Politik merupakan suatu bidang studi khusus tentang cara-cara manusia memecahkan permasalahan-



permasalahan bersama dengan manusia yang lain .... titik sentral studi politik adalah kekuasaan dalam konteks masyarakat”.

Kehidupan politik tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat karena pasti ada interaksi sosial baik antarwarga dengan pemerintah dan institusi-institusi di luar pemerintah atau non formal. Hal itu kemudian menghasilkan dan membentuk beragam pendapat, tujuan, pandangan, dan pengetahuan mengenai segala macam praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Seringkali dapat dilihat dan diukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik, dan lain-lain. Keragaman pendapat, tujuan, pandangan, dan pengetahuan ini merupakan hasil dari interaksi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, masyarakat dengan pemerintah atau negara akan menghasilkan sistem yang teratur pada pola-pola hubungan dan persepsi suatu bangsa terhadap mekanisme politik suatu negara. Pola-pola hubungan dan persepsi tersebut selanjutnya membentuk perilaku bangsa secara khas yang dalam pokok kajian ini dinamakan budaya politik (Setiadi dkk, 2013: 94).

Pada awalnya konsep budaya politik lahir dan memberikan warna baru ke dalam ilmu politik saat Perang Dunia II (PD II) meletus, sebagai dampak dari perkembangan politik di Amerika Serikat. Setelah PD II selesai, di Amerika Serikat terjadilah revolusi dalam ilmu politik, yang dikenal dengan sebutan *Behavioral Revolution* atau *Behavioralism*. Hal ini merupakan dampak dari menguatnya tradisi atau paham positivisme, paham

ini percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam. Paham ini kuat diyakini oleh tokoh-tokoh besar sosiologi, antara lain Herbert Spencer, Auguste Comte, dan Emile Durkheim. Pelopor paham positivisme di Amerika Serikat ialah Charles E. Merriam, yang kemudian dikenal dengan *The Chicago School* atau mazhab Chicago yang berasal dari Universitas Chicago, memulai pendekatan baru dalam ilmu politik (Gaffar, 2006: 97).

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengungkapkan bahwa “budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik .... Budaya politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap objek sosial. Sistem politik mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif, afektif, dan evaluatif” (Sitepu, 2012: 164).

Menurut Kartaprawira (1983: 2-21), sistem politik sendiri dimaknai sebagai berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan. Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan ketergantungan bagian-bagiannya. Selain itu, sistem ini harus dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian, Sistem Politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku atau sebagaimana adanya di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian saja.

Berikut ini adalah definisi budaya politik yang diberikan oleh pakar (Gatara dkk, 2011: 237-238).

- a. Alan R. Ball mendefinisikan budaya politik sebagai suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
- b. Austin Ranney menyebutkan bahwa budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik.
- c. Rusadi Kartaprawira menyebutkan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sebenarnya, istilah budaya politik tertentu inheren pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transnasional, maupun modern.

Budaya politik bagi pandangan Almond dkk, 1990: 16-17 adalah tidak lain adalah orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam konteks ini dalam sistem politik yang selanjutnya mengalami proses internalisasi ke dalam beberapa bentuk.

- a. Orientasi kognitif, berisikan pengetahuan dan kesadaran terhadap tentang dan kepercayaan pada objek-objek politik, seperti tentang ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang digunakan, dan lain sebagainya, atau yang berkenaan dengan apa-apa

yang dipercayai oleh warga negara yang berkaitan dengan apa yang terjadi dalam dunia politik, peranan, dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.

- b. Orientasi afektif adalah yang berisi perasaan-perasaan dan emosi-emosi terhadap objek-objek politik atau sistem politik. Hal ini menyangkut pada masalah ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Isinya bisa mengenai peranan-peranan yang dilakukan oleh struktur politiknya, para aktor (pelaku politik) dan apa yang dilakukan dalam penampilan mereka dalam praktik politik.
- c. Orientasi evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi perasaan. Atau dalam pengertian yang lain, tipe orientasi politik semacam ini merupakan tingkatan yang tertinggi dalam kualitas orientasi politik. Di dalamnya sudah terdapat dan berisikan pemahaman yang lebih tinggi tentang sistem politik. Seseorang yang memiliki orientasi politik evaluatif, sudah mampu membuat keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik, yang didasarkan kepada kombinasi standar nilai dan kriteria yang didasarkan kepada informasi yang diperoleh dan perasaan tentang hal-hal tersebut.

Di Indonesia khususnya di Jawa, Anderson, 2007: 2 mengungkapkan bahwa “Budaya Jawa tradisional memiliki teori politik yang mana menawarkan penjelasan yang sistematis dan logis dari budaya politik yang cukup independen dari perspektif ilmu politik modern dalam

banyak hal. Mendeskripsikan gambaran sosial dan kehidupan politik dilihat dari lensa tradisional Jawa dan untuk menggambarkan pertentangan yang terlihat dengan gambaran yang dilihat dari lensa ilmu modern. Pada akhirnya lensa tersebut ... mempengaruhi tingkah laku”.

Menurut Anderson, 2007: 5-8, uraian dari ide kekuasaan Jawa mungkin difasilitasi oleh perbedaan skematis dengan objek yang lebih signifikan dari konsep Eropa modern, yang dapat dirangkum ke dalam 4 hal pokok.

- a. Kekuasaan bersifat abstrak. Kekuasaan adalah kata yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan hubungan.
- b. Sumber kekuasaan bersifat heterogeenus. Dengan demikian kita telah menerima berbagai sumber dari kekuasaan sebagai kekayaan, status sosial, kantor formal, dan organisasi, senjata, populasi, dan sebagainya.
- c. Akumulasi kekuasaan tidak memiliki batas yang melekat. Pada kalimat penjelasan ini, konsep kita mengenai kekuasaan secara langsung bersyarat. Oleh perkembangan percepatan teknologi modern.
- d. Kekuasaan secara moral ambigu. Secara logis dari konsepsi sekuler dari kekuasaan politik, ambiguitas moral ini, tentu saja, ditingkatkan dengan pandangan kita tentang kekuasaan berasal dari sumber heterogen.

Menurut Setiadi dkk (2013: 104-126) tipe-tipe budaya politik dapat dibedakan berdasarkan sikap yang ditunjukkan, berdasarkan orientasi politiknya, dan berdasarkan budaya politik yang berkembang di Indonesia.

### a. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap militan atau sifat toleransi.

#### 1) Budaya Politik Militan

Budaya politik di mana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi. Budaya ini sangatlah emosional dan terkesan praktis.

#### 2) Budaya Politik Toleransi

Budaya politik yang pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang. Pernyataan dengan jiwa toleransi hampir mengundang kerja sama.

Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, maka budaya politik terbagi atas.

### 1) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut

Budaya politik ini memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang bertentangan. Budaya politik absolut ini bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi.

### 2) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna dan komprehensif.

#### **b. Berdasarkan Orientasi Politiknya**

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipenya memiliki

karakteristik yang berbeda. Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut.

#### 1) Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Beberapa ciri budaya politik parokial dapat dilihat sebagai berikut.

- a) Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek input, objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
- b) Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
- c) Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.
- d) Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
- e) Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana di mana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.
- f) Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif.

#### 2) Budaya Politik Subjek atau Kaula

Budaya politik subjek (*subject political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun



ekonominya), tetapi masih bersifat pasif. Beberapa ciri budaya politik subjek (kaula) dapat dilihat sebagai berikut.

- a) Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek *output* dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
- b) Para subjek menyadari akan otoritas pemerintah.
- c) Hubungannya terhadap sistem politik secara umum dan terhadap *output*, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
- d) Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiasikan.
- e) Orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

### 3) Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan (*participan political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Beberapa ciri budaya politik partisipan dapat dilihat sebagai berikut.

- a) Frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek umum, objek *input*, *output*, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
- b) Bentuk kultur di mana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara

komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek *input* dan *output* sistem politik).

- c) Anggota masyarakat partisipatif terhadap objek politik.
- d) Masyarakat berperan sebagai aktivis.

Namun, dalam kenyataannya tidak ada satu pun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, parokial, atau subjek. Melainkan terdapat variasi campuran diantara ketiga tipe-tipe tersebut. Ketiganya menurut Almond dan Verba bervariasi dalam tiga bentuk budaya politik, sebagai berikut.

1. Budaya politik subjek-parokial.
2. Budaya politik subjek-partisipan.
3. Budaya politik parokial-partisipan.

Berdasarkan penggolongan atau bentuk-bentuk budaya politik tersebut, maka dapat dibagi dalam tiga model kebudayaan politik sebagai berikut.

1. Model demokratis-industrial ditunjukkan dengan cukup banyaknya aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar.
2. Model sistem otoriter ditunjukkan dengan adanya jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum intelektual dengan

tindakan persuasif menentang sistem yang ada, tetapi sebagian besar jumlah rakyat hanya menjadi subjek yang pasif.

3. Model demokratis pra-industrial yang ditandai dengan hanya terdapat sedikit pula keterlibatannya dalam pemerintahan.

**c. Berdasarkan Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia**

Oleh karena adanya proses internalisasi budaya politik dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, terbentuklah Budaya Politik Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu budaya politik di kalangan priyayi atau Jawa, kecenderungan patronage, dan kecenderungan neo-patrimonialistik. Masyarakat yang beragam dan dinamis, memunculkan warna baru dan kekhasan pada budaya politiknya seperti halnya di Indonesia.

Perubahan sosial budaya berakibat pada perubahan sikap-sikap politik tradisional, kemudian berubah mengarah pada orientasi politik yang bersifat pragmatis. Budaya politik Indonesia lebih banyak didominasi oleh budaya politik Jawa. Banyaknya simbol-simbol Jawa yang menjadi simbol negara menunjukkan betapa eratnya budaya Jawa mendominasi sistem budaya politik Indonesia.

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, guna mengetahui budaya politik masyarakat Desa Kedadongan, peneliti perlu melacak beberapa hal, antara lain.

- a. Pengetahuan individu terhadap sistem politik (baik mengenai pengertian sistem politik yang dianut negaranya, sejarah, sifat-sifat konstitusi dan pengetahuan umum lainnya).
- b. Pemahaman individu mengenai *input* sistem politik, seperti pengetahuan mengenai struktur dan peranan elit politik serta mekanisme pengajuan-pengajuan tuntutan politik atau pengajuan kebijaksanaan politik. Kemudian perasaan-perasaan individu mengenai struktur elit beserta proposal kebijaksanaan yang mereka ajukan ke sistem politik.
- c. Pemahaman individu mengenai *output* sistem politik, seperti pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh sistem politik. Juga mengenai mekanisme pemunculan kebijakan-kebijakan tersebut serta mengenai perasaan mereka terhadap dampak yang dirasakan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sistem politik.
- d. Partisipasi politik individu. Menyangkut argumentasi individu mengenai perasaannya sebagai bagian dari sistem politik. Lalu pengetahuan mereka terhadap hak-hak, kewajiban serta strategi-strategi individu untuk melakukan tekanan atau mempengaruhi sistem politik.

## **2. Partisipasi Politik**

Keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik disebut partisipasi politik. Warga negara secara individu yang bukan politikus atau

bukan pemimpin politik yang melakukan partisipasi politik disebut partisipan politik, yaitu pengikut politik atentif atau yang berminat dan ikut dalam kegiatan politik. Partisipan politik dibagi dalam dua bentuk yaitu partisipan pengamat dan partisipan mitra. Partisipan pengamat adalah kalangan akademisi yang memiliki minat, pengetahuan dan kompetensi, serta rajin mengikuti perkembangan politik secara kritis, sebagai khalayak media massa. Mereka sering menyatakan pendapat atau komentar secara terbuka melalui pers, radio atau televisi, tetapi tidak mau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sedang partisipan mitra pada umumnya adalah aktivis atau orang-orang yang ingin menjadi aktivis sehingga melibatkan diri dalam kegiatan politik sebagai mitra politikus. Mereka juga khalayak media massa, yang aktif dalam politik praktis, karena mungkin diberi tugas dan fungsi sebagai “tim sukses” oleh politikus (Arifin, 2015: 77-81).

Pengertian lain mengenai partisipasi politik dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff, mereka menyebutkan bahwa partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum (Maran, 2007: 147).

Pemahaman lain mengenai partisipasi politik menurut Budhiarjo (2010: 367-368), menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Di

negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertindak bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Menurut Rush (1990: 124), partisipasi politik memiliki beberapa bentuk, berikut urutan bentuknya dari paling rendah ke paling atas.

- a. *Voting* (pemberian suara).
- b. Partisipasi dalam diskusi informal minat umum dalam politik.
- c. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*).
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*).
- f. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.
- g. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.
- h. Mencari jabatan politik atau administratif.
- i. Menduduki jabatan politik atau administratif.

Rush (1990: 130-131), juga mengungkapkan bahwa pentingnya partisipasi berbeda-beda dalam suatu sistem politik, mereka akan berbeda di dalam suatu sistem menurut waktunya. Akan terdapat berbagai pembatasan pada partisipasi politik, beberapa bersifat formal dan beberapa informal. Pada masyarakat primitif, di mana politik cenderung erat integrasinya dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakannya dari kegiatan lain. Akan tetapi, dalam masyarakat berkembang, karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dan tradisional, partisipasi mungkin dibatasi oleh faktor-faktor seperti tingkatan melek huruf dan masalah umum dari komunikasi.

Berlawanan dengan hal ini ialah partisipasi politik dalam masyarakat totaliter yaitu dalam beberapa bentuk partisipasi mungkin sangat tinggi dan yang lainnya mungkin sangat rendah, sedangkan menurut definisi, salah satu karakteristik paling penting dari masyarakat totaliter adalah bahwa mereka berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada semua tingkatan. Taraf variasi yang paling besar kiranya terdapat dalam negara demokrasi modern, yang biasanya mendorong adanya partisipasi dengan berbagai cara, pada umumnya justru membiarkan partisipasi tersebut menemukan tingkatannya sendiri.

Almond dkk (1990: 231-237) juga mengungkapkan keterkaitan antara partisipasi politik dengan sistem politik. Meskipun kompetensi dan partisipasi warga negara berada pada jantung definisi demokrasi, masalah yang dihadapi pemerintah-pemerintah demokratis akan menjadi lebih sederhana jika yang menjadi sentral perhatian hanyalah mencapai kompetensi dan partisipasi maksimum. Namun, sistem politik yang berusaha mencapai tujuan tersebut dengan mengorbankan berbagai tujuan

lainnya tidak akan dapat bertahan lama. Sistem politik, jika ia tetap ingin bertahan, secara relatif harus efektif dan memiliki keabsahan, dalam arti segala yang diselesaikan pemerintah setidaknya harus mampu memberi kepuasan bagi warga negara sehingga mereka nantinya tidak berbalik melawan pemerintah. Setiap sistem politik yang ingin memiliki potensi untuk tetap hidup dalam jangka waktu panjang, ia harus mendapat legitimasi warga negara sebagai bentuk pemerintahan yang sesungguhnya. Partisipasi politik akan mempengaruhi efektivitas sistem termasuk keabsahannya.

Hal terpenting dalam memahami partisipasi politik adalah hubungan antara rasa mampu untuk ikut ambil bagian dengan kesetiaan individu terhadap sistem tercermin di dalam evaluasinya terhadap keabsahan dan efektivitas sistem. Salah satu keuntungan sistem politik demokratis ialah bahwa setiap orang dapat berpartisipasi di dalam keputusan akan lebih dipuaskan oleh keputusan itu dan akan lebih akrab dengan sistem itu daripada orang-orang yang tak dapat ikut serta. Dalam menanggapi *input* yang berpengaruh, sistem menimbulkan *output* yang dengan cara tertentu lebih menguntungkan individu daripada jika sistem itu tanpa *input*. Ditinjau dari sudut pandang partisipan, akan lebih menguntungkan dimana para partisipan tersebut akan merasa puas dengan *output* yang dihasilkan dan bersifat absah dimana partisipan menganggap sistem tersebut sebagai sesuatu yang patut. Rasa puas terhadap sistem politik terjadi dalam beberapa bentuk. Ada tiga jenis orientasi terhadap sistem politik 1) terhadap struktur pengaruh politik (struktur *input*); 2) terhadap struktur *output* pemerintahan;



dan 3) orientasi yang terpancar secara lebih umum terhadap sistem politik sebagai keseluruhan.

Maran (2007: 156-157), dalam bukunya mengungkapkan bahwa Morris Rosenberg mengemukakan tiga alasan mengapa orang mau menghindari diri dari partisipasi politik 1) karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik; 2) karena orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan; dan 3) karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kemudian, Frank Lindenfeld menemukan faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi politik adalah kepuasan finansial. Status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan orang yang tersebut akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki keamanan ekonomi. Sedangkan menurut Milbrath menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik 1) karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik (misalnya dipengaruhi oleh media massa atau diskusi informal mengenai politik); 2) karena faktor karakteristik pribadi seseorang (berwatak sosial, punya kepedulian besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dll); 3) faktor karakter sosial seseorang (menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama); 4) faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri (lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik).

Partisipasi politik memiliki beberapa fungsi, antara lain 1) partisipasi sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, 2) partisipasi untuk memuaskan suatu kebutuhan untuk penyesuaian sosial, 3) partisipasi sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, dan 4) partisipasi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu. Cara berpartisipasi dalam proses politik dikemukakan oleh Dan Nimmo misalnya yang menyatakan bahwa partisipasi politik menggunakan tiga cara, yaitu 1) gaya partisipasi, 2) motif partisipasi, dan 3) konsekuensi partisipasi. Gaya partisipasi meliputi gaya langsung atau wakil, kentara atau tidak kentara, individual atau kolektif, sistematis atau acak, terbuka atau tersembunyi, berkomitmen atau tidak berkomitmen, dan derita atau kesenangan. Sedang motif partisipasi terdiri atas disengaja atau tidak disengaja, rasional atau emosional, kebutuhan psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam atau dari luar, dan berpikir atau tidak berpikir. Kemudian, konsekuensi partisipasi mencakup fungsional atau disfungsional bersinambungan atau terputus, dan mendukung atau menuntut (Arifin, 2015: 83-84).

### 3. Masyarakat

Smith, Stanley, dan Shores mendefinisikan “masyarakat sebagai suatu kelompok individu-individu yang terorganisasi serta berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok yang berbeda. Znaniecki mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem yang meliputi unik biofisik

para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu selama periode waktu tertentu dari suatu generasi.” (Setiadi, 2013: 7-9).

Masyarakat juga dimaknai sebagai “sebuah sistem di mana terdapat interaksi antarkomponen, baik individu, kelompok, atau lembaga-lembaga. Mereka hidup saling bergantung, saling pengaruh mempengaruhi, saling menjaga dan saling menghargai dalam harmonitas sosial yang tersusun berdasarkan suatu ikatan norma-norma dan nilai-nilai yang diakui, ditaati dan dianut untuk mengatur jalannya interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari demi menjaga keseimbangan keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri” (Purwasito, 2015: 114-115).

Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, diantaranya masyarakat setempat, masyarakat desa, dan masyarakat kota (Soekanto 2007: 132-144).

#### **a. Masyarakat Setempat**

Masyarakat setempat menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat setempat. Kriteria utama bagi adanya suatu masyarakat setempat adalah adanya *social relationships* antara anggota suatu kelompok. Masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-

batas tertentu di mana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Unsur-unsur persamaan perasaan masyarakat setempat antara lain 1) seperasaan, 2) sepenanggungan, dan 3) saling memerlukan. Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat, dapat digunakan empat kriteria yang saling berpautan, yaitu 1) jumlah penduduk, 2) luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, 3) fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan 4) organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Kriteria tersebut dapat digunakan untuk membedakan antara bermacam-macam jenis masyarakat setempat yang sederhana dan modern, serta antara masyarakat pedesaan dan perkotaan.

#### **b. Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan**

Warga pedesaan, suatu masyarakat mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Hal ini dikarenakan sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat pada umumnya hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan di samping pertanian hanya pekerjaan sambilan saja karena bila tiba masa panen atau masa menanam padi, pekerjaan-pekerjaan sambilan tadi kemudian beralih ke pekerjaan lain. Pada masyarakat-masyarakat pedesaan tidak akan dijumpai pembagian kerja didasarkan

pada usia, mengingat kemampuan fisik masing-masing dan juga atas dasar perbedaan kelamin.

Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang dihadapi. Apabila ditinjau dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dengan rakyat berlangsung secara tidak resmi. Segala sesuatu dilaksanakan atas dasar musyawarah. Oleh karena tidak ada pembagian kerja yang tegas, seorang penguasa sekaligus mempunyai beberapa kedudukan dan peranan yang sama sekali tidak dapat dipisah-pisahkan atau paling tidak sukar untuk dibedakan. Apalagi di desa yang terpencil, sukar sekali untuk memisahkan antara kedudukan dengan peranan seorang kepala desa sebagai orang tua yang nasihat-nasihatnya patut dijadikan pegangan, sebagai seorang pemimpin upacara adat dan lain sebagainya.

Masyarakat perkotaan atau *urban community* adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota yaitu 1) kehidupan agama berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa karena cara berpikir yang rasional, 2) orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain, 3) pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan punya batas-batas nyata, 4) kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa karena sistem pembagian kerja yang tegas, 5) jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi, 6) jalan kehidupan yang cepat di kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting untuk

dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu, dan 7) perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota karena biasanya terbuka dalam menerima pengaruh luar.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang dihargai dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kemudian, Musyawarah desa sendiri dimaknai sebagai musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sedangkan Peraturan Desa sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Kepala Desa dan perangkat desa dilarang berkecimpung di dalam ranah politik sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 29 mengenai larangan Kepala Desa dan pasal 51 mengenai larangan Perangkat Desa. Berikut isi UU No. 6 Tahun 2014 pasal 29 yang berkenaan dengan larangan Kepala Desa berkaitan dengan politik antara lain 1) menjadi pengurus partai politik, 2) ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah. Kemudian, berikut isi UU No. 6 Tahun 2014 pasal 51 yang berkenaan dengan larangan Perangkat Desa berkaitan dengan politik antara lain 1) menjadi pengurus partai politik, 2) ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah.

Kedua pasal tersebut sama-sama berisi larangan agar Pemerintahan Desa tidak campur tangan dalam ranah politik.

#### 4. Pemilihan Umum

Menurut Labolo dkk (2015: 50-53), pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan. Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu adalah suatu proses yang substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Beberapa fungsi dan tujuan dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain 1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung, 2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah, 3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, 4) sarana rekrutmen politik, 5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Berdasarkan pemikiran Budiardjo (2010: 461- 462) di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip, yaitu 1) *single-member constituency* (satu daerah pemilihan



memilih satu wakil atau biasanya disebut sistem distrik), 2) *multi-member constituency* (satu daerah pemilih memilih beberapa wakil atau biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional).

Pada sistem distrik, satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas, sedangkan dalam sistem proporsional, satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

Secara umum dapat disebutkan bahwa pemilihan umum sistem proporsional menunjuk pada pertarungan antara partai politik dalam sebuah daerah pemilihan yang luas untuk mencari beberapa orang wakil. Partai politik mencalonkan banyak kandidat dalam sebuah daftar dengan nomor urut. Suara yang diperoleh oleh setiap kontestan (partai politik dihitung), kemudian setiap kontestan akan memperoleh kursi secara proporsional dengan suara yang diperoleh. Kandidat yang terpilih mewakili daerah itu ditetapkan berdasarkan nomor urut dari atas ke bawah, dalam hal ini tidak ada suara pemilih yang hilang (Arifin, 2012: 110).

Kemudian, pelaksanaan Pilkada langsung lahir merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada melalui perwakilan (oleh DPRD) sebagaimana pernah diamanatkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Koreksi ini semakin kentara dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan Pilkada Langsung, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaiki melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2008. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tahapan Pilkada secara langsung dibagi



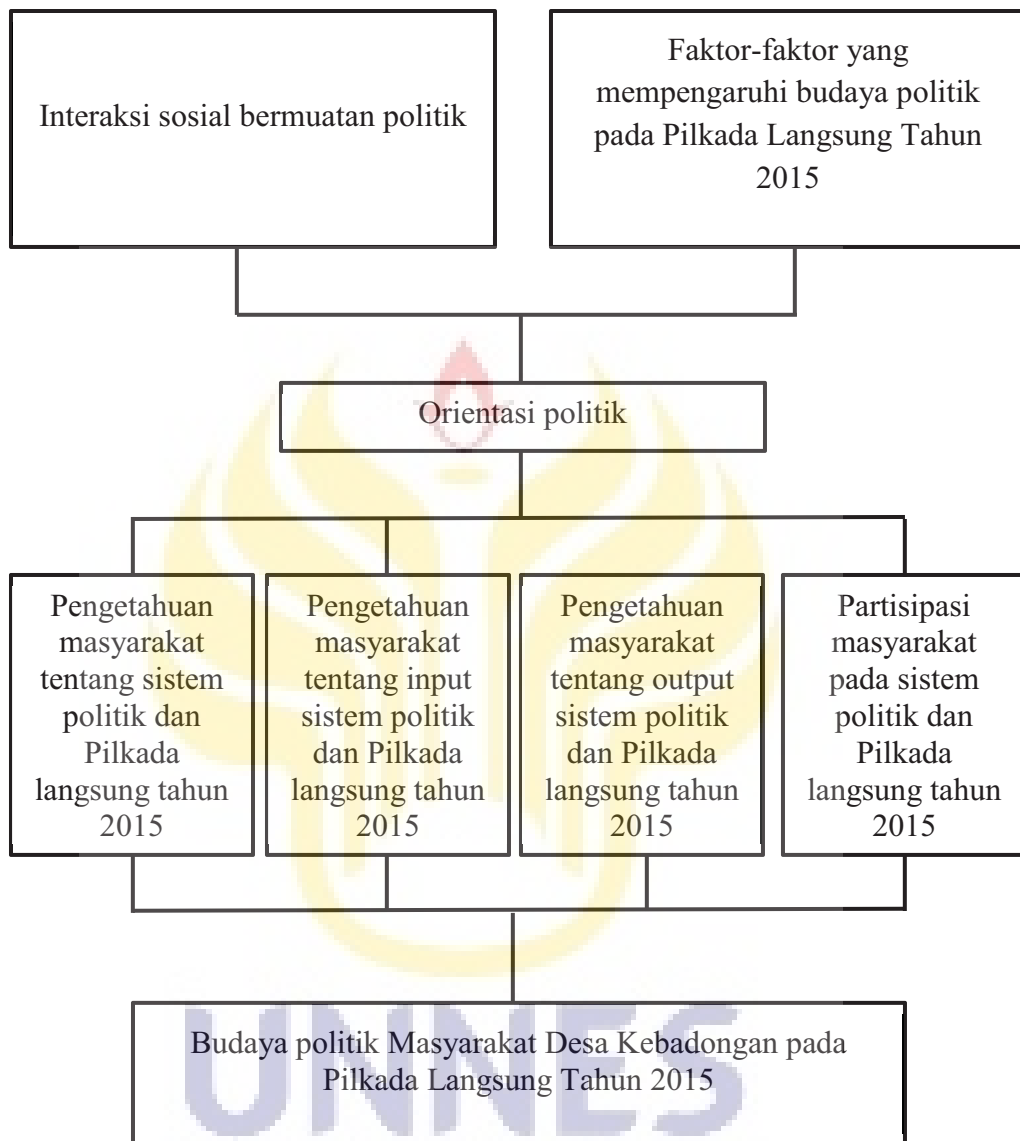
menjadi dua tahap, yang terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi 1) DPRD memberitahukan kepada kepala daerah maupun KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, 2) kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, 3) KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meliputi penetapan tatacara jadwal tahapan Pilkada, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau, 4) DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, dan Tokoh Masyarakat. Selanjutnya, tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih dan pengesahan serta pelantikan calon terpilih (Agustino, 2009: 78-82).

Menurut Agustino (2009: 82), secara umum semua Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia mulai digelar Juni 2015. Menteri Dalam Negeri RI pada waktu itu (Moh. Ma'ruf) pun dalam beberapa kali tayangan iklan beberapa layar kaca sempat mengakui bahwa 92% pelaksanaan Pilkada langsung berjalan baik dan lancar. Kemudian,

Hollyson dkk (2015: 99-108) menuturkan bahwa para pendukung pilihan kepala daerah secara langsung mempunyai argumen bahwa kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan langsung dianggap lebih mewakili masyarakat yang memilihnya. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pemilihan, dengan sistem *one man one vote* semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menentukan daerahnya lima tahun ke depan. Pada sistem pemilihan langsung sudah sangat jelas bahwa masyarakat ikut berperan serta dalam pemilihan kepala daerah lima tahun ke depan.

Beberapa hal yang menjadi kriteria utama dalam pemilihan kepala daerah secara langsung oleh partai politik adalah 1) tingkat elektabilitas, 2) kemampuan finansial, 3) kader partai, 4) restu pimpinan rakyat, dan 5) *track record*. Mengingat besarnya dana yang harus digelontorkan pada penyelenggaraan Pilkada langsung, maka akan memperbesar kemungkinan korupsi. Besarnya ongkos politik yang harus ditanggung oleh pasangan calon kepala daerah pada saat penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah berdampak negatif terhadap kepala daerah terpilih. Kepala daerah terperangkap oleh kewajiban balas jasa kepada para pendukung dan tim sukses yang telah memberikan waktu, tenaga dan uang. Di saat kursi kepala daerah telah diraih, maka kepala daerah mempunyai "PR" baru untuk mengembalikan bantuan dan membalas jasa dari pendukung dan tim sukses.

## B. Kerangka Berpikir



Gambar 3.1. Kerangka Berpikir Budaya Politik Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

### C. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

Demi menunjang ketajaman penelitian, peneliti merasa perlu menjadikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi. Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah penelitian-penelitian yang mengkaji dan terfokus pada budaya politik suatu masyarakat.

#### 1. Penelitian Huzer Apriansah (Fisip Undip 2005)

##### a. Judul

Budaya dan Perilaku Politik Masyarakat Pengikut Saminisme (Studi Kasus di Dusun Klopo Duwur Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo dan Dusun Ploso Wetan Desa Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah)

##### b. Fokus Kajian

Penelitian ini menjelaskan tentang budaya politik dan perilaku politik masyarakat pengikut Saminisme.

##### c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah tipe budaya politik dan perilaku politik yang terjadi dalam masyarakat Samin?
- 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi budaya dan perilaku politik masyarakat Samin?

##### d. Metodologi kualitatif.

##### e. Hasil

Masyarakat pengikut saminisme yaitu subyek parokial.

#### 2. Penelitian Nia Kurniawati (Unnes 2011)

##### a. Judul

Budaya Politik Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten". Secara garis besar, Penelitian ini menjelaskan tentang budaya politik masyarakat Suku Baduy yang tinggal di Desa Kanekes, Provinsi Banten

b. Fokus Kajian

Tipe budaya politik, hubungan masyarakat, dan struktur sosial Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tipe budaya politik masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten?
- 2) Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes dengan orang asing/luar Suku Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten?
- 3) Bagaimana struktur sosial masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten?

d. Metodologi kualitatif.

e. Hasil

Pada dasarnya masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak memiliki kecenderungan kearah tipe budaya politik parokial-partisipan (*the parochial-participant political culture*), yang mengarah pada budaya politik ini adalah masyarakat Suku Baduy Luar. Masyarakat Suku Baduy Luar dalam hal kognitifnya nol yakni segi pendidikan yang mereka peroleh tidak ada namun dalam berpartisipasi dalam hal kenegaraan. Kemudian tipe atau bentuk budaya politik subyekparokial (*the parochial- subject political culture*) dimiliki oleh masyarakat Suku Baduy Dalam; dalam tingkat kognitifnya bersifat nol lalu dalam tingkat partisipasi masih pasif.

### 3. Penelitian Galuh Septianingrum (FIS UNY 2012)

a. Judul

Budaya Politik dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Suwatu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Pati Tahun 2012

b. Fokus Kajian

Mengetahui dan menggambarkan budaya politik dan perilaku memilih masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana budaya politik masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012?
- 2) Bagaimana perilaku memilih masyarakat Desa Suwatu pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012?

d. Metodologi kualitatif.

e. Hasil

Masyarakat Desa Suwatu termasuk dalam tipe budaya politik subjek partisipan. Dimana mereka tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam kegiatan politik dengan cara yang lebih pasif. Mereka hanya berpartisipasi dalam output sistem politik yaitu mereka sudah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada secara langsung di Kabupaten Pati tahun 2012. Selain itu, mereka juga tetap mengikuti perkembangan berita-berita politik dengan frekuensi yang tidak terlalu sering, tetapi mereka juga tidak berusaha untuk mengawasi, mengawal, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosional mereka terhadap negaranya tidak terlalu besar.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dibahas sebelumnya, beberapa hal yang dapat kita ketahui mengenai budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan adalah sebagai berikut.

1. Budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan berawal dari interaksi sosial yang bermuatan politik dan mengalami internalisasi ke dalam masyarakat yang selanjutnya menentukan pemahaman mereka terhadap sistem politik. Kemudian, dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pendidikan, media massa, dan imbalan. Hal tersebut menghasilkan orientasi kognitif yang cukup baik dan orientasi afektif yang cukup baik, tetapi orientasi evaluatif kurang baik pada saat Pilkada Langsung Tahun 2015. Kemudian diketahuilah pemahaman masyarakat terhadap sistem politik, *input* dan *output* dalam sistem politik, dan peran mereka dalam sistem politik.
2. Berdasarkan analisis penulis, secara umum dapat diketahui bahwa Masyarakat Desa Kedadongan termasuk ke dalam budaya politik subjek-partisipan sesuai dengan teori Gabriel Almond dan Sidney Verba. Masyarakat Desa Kedadongan memiliki pemahaman mengenai sistem politik, tetapi keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan politik termasuk pasif, begitu pula pada saat Pilkada Langsung Tahun 2015. Ketika membicarakan persoalan *input* dalam sistem politik, masyarakat

hanya mengetahui sebatas lingkup desa saja, seperti struktur dan peranan pada pemerintahan desa. Ketika Pilkada Langsung Tahun 2015 pun Masyarakat Desa Kedadongan kekurangan informasi sehingga pengetahuan mereka mengenai *input* dan *output* kurang baik. Partisipasi mereka sebatas di lingkup desa dan pada saat Pilkada Langsung Tahun 2015 ada yang menjadi tim sukses dan beberapa masyarakat dilibatkan dalam panitia pemilihan, mereka cukup aktif. Akan tetapi ketika ada ketidaksesuaian dalam pemerintahan dari pasangan calon yang terpilih pada Pilkada Langsung Tahun 2015 masyarakat sangat jarang atau bahkan tidak pernah memberikan kritik maupun saran, padahal mereka mengakui sebenarnya ada saja hal-hal yang kurang pas.

## **B. Saran**

1. Masyarakat Desa Kedadongan diharapkan mampu menyaring informasi-informasi politik secara bijak, sehingga keterbukaan masyarakat terhadap politik mampu selaras dengan kestabilan keadaan budaya politik masyarakat.
2. Masyarakat Desa Kedadongan diharapkan bisa lebih aktif dalam berbagai kegiatan politik di wilayah yang lebih luas agar dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan bersama termasuk ketika dilaksanakan Pemilu, sehingga akan menciptakan kerja sama yang baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Anderson, Benedict R. O’G. 2007. ‘The Idea of Power in Javanese Culture’. Dalam Holt, Claire (Ed.). *Culture and Politics in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing. Hal. 1-8.
- Apriansah, Huzer. 2005. ‘Budaya dan Perilaku Politik Masyarakat Pengikut Saminisme (Studi Kasus di Dusun Klopo Duwur Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo dan Dusun Ploso Wetan Desa Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah)’. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik Paradigma- Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, Anwar. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Digdoyo, Eko. 2015. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gaffar, Afan 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gatara, A.A. Said dan Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Heryanto, Gun Gun dan Shulhan Rumar. 2013. *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kartaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kurniawati, Nia. 2011. ‘Budaya Politik Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten’. Secara garis besar, Penelitian ini menjelaskan tentang budaya politik masyarakat Suku Baduy

- yang tinggal di Desa Kanekes, Provinsi Banten'. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial.
- Kuntowijoyo, 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kuswandi, Aos. 2010. 'Membangun Gerakan Budaya Politik dalam Sistem Politik Indonesia'. Dalam *Governance*. No. 1. Hal. 48.
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Meinarno, A. Eko, Bambang Widiyanto, dan Rizkia Halida. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mz, Rahmat Hollyson dan Sri Sundari. 2015. *Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna*. Jakarta: Penerbit Bestari.
- Ningsi, Rosita Mulya. 2012. *Media Massa dan Budaya Politik*. Kompasiana. [https://www.kompasiana.com/ocharosita/media-massa-dan-budaya-politik\\_550d59bfa333116e1c2e3b34](https://www.kompasiana.com/ocharosita/media-massa-dan-budaya-politik_550d59bfa333116e1c2e3b34). (27 November 2017)
- Purwasito, Andrik. 2015. *Komunikasi Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: Unnes Press.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 1990. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Septianingrum, Galuh. 2012. 'Budaya Politik dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Suwatu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Pati Tahun 2012'. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sudirman, La dan La Jamaa. 2016. 'Hibah dan *Money Politic* dalam Pemilu dan Pilkada (Pandangan Tokoh Agama di Kota Ambon terhadap Hibah dan

*Money Politic) Perspektif Sosiologi dan Politik'. Dalam Jurnal Fikratuna. No. 2. Hal. 37.*

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang DESA.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

